

PENGEMBANGAN EKOWISATA DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Oleh: Iwan Nugroho

Guru Besar Universitas Widyagama Malang



Transformasi pembangunan ekonomi Indonesia menarik ditelaah. Bagi Indonesia, transformasi dari sektor pertanian ke industri manufaktur menghadapi kendala yang serius, yakni lemahnya sektor permodalan, ketrampilan maupun *entrepreneurship* untuk mengolah produk-produk pertanian. Hal ini yang mengakibatkan sebagian besar tenaga kerja masih menggantungkan kepada sektor pertanian. Hanya sebagian kecil saja petani di desa yang sukses berwirausaha mengolah hasil-hasil pertanian.

Jalan keluar yang dapat disarankan adalah proses transformasi yang melompat dari pertanian ke sektor jasa. Petani secara berangsur-angsur dapat mengembangkan jasa-jasa lingkungan dan sosial spesifik di wilayahnya masing-masing. Dengan penduduk yang tersebar di sekitar 17 ribu pulau, 470 suku bangsa, 19 daerah hukum adat, dan

tidak kurang dari 300 bahasa, serta ragam (warisan) budaya yang tinggi, merupakan aset utama yang dapat dikemas sebagai produk wisata (Ardiwidjaja, 2006). Dengan demikian, petani atau penduduk lokal memiliki pilihan dan ragam pro-duksi tidak hanya dari usaha tani, ikan atau ternak, tetapi juga berasal dari usaha jasa ekowisata maupun penunjang wisata lainnya. Hal ini pada gilirannya akan menghasilkan insentif untuk mengkonservasi sistem produksi pertanian, nilai-nilai tradisi dan budaya serta kelestarian lingkungan. Pemanfaatan konstelasi geografi tersebut dan memperkuat wawasan kebangsaan dan geopolitik Indonesia (Pokja Wasantara, 2010). Pemerintah daerah (pemda) secara langsung atau tidak langsung juga memperoleh manfaat dari kegiatan ekowisata.

Tentu saja jalan keluar tersebut harus diperjuangkan. Petani atau penduduk lokal tidak dapat berupaya sendiri. Mereka perlu dibantu dengan berbagai kebijakan dan program yang relevan. Tidak hanya petani, unsur-unsur pemda juga perlu menjalani proses pembelajaran untuk memahami ekowisata atau pariwisata. Memahami apalagi menjalankan dunia ekowisata atau pariwisata memerlukan perubahan sikap dan perilaku untuk lebih terbuka dan toleransi, serta bersedia memperbaiki diri sesuai budaya pariwisata.

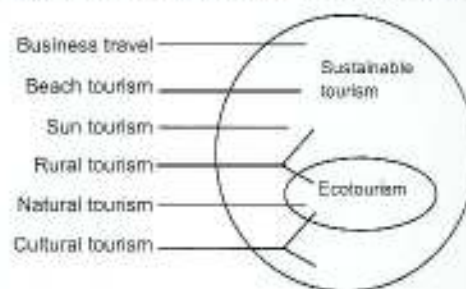
Tulisan ini mencoba menelaah pengembangan potensi ekowisata untuk mendukung pembangunan daerah.

Ekowisata

Pariwisata (*tourism*) atau kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha (UU 10/2009 tentang Kepariwisata).

Definisi pariwisata atau *tourism* memiliki ruang lingkup dan kegiatan yang luas, setidaknya meliputi lima jenis kegiatan meliputi wisata bahari (*beach and sun tourism*), wisata pedesaan (*rural and agro*

tourism), wisata alam (*natural tourism*), wisata budaya (*cultural tourism*), atau perjalanan bisnis (*business travel*). Posisi ekowisata (*ecotourism*) memang agak unik, berpijak pada tiga kaki sekaligus, yakni wisata pedesaan, wisata alam dan wisata budaya.



Gambar 1. *Tourism dan ekowisata* (Wood, 2002)

Menurut The International Ecotourism Society (TIES), ekowisata adalah kegiatan perjalanan wisata yang dikemas secara profesional, terlatih, dan memuat unsur pendidikan, sebagai suatu sektor usaha ekonomi, yang mempertimbangkan warisan budaya, partisipasi dan kesejahteraan penduduk lokal serta upaya-upaya konservasi sumberdaya alam dan lingkungan (TIES, 2006).

Sebagai suatu usaha ekonomi, operasional jasa ekowisata sangat efisien dan ramping. Karakteristiknya adalah jumlah rombongan pengunjung rendah (*low volume*), pelayanan berkualitas (*high quality*) dan menghasilkan nilai tambah yang tinggi (*high value added*). Aspek manajemen mencakup (i) pemasaran yang spesifik menuju tujuan ekowisata, (ii) pasar ekowisata adalah pengunjung seluruh dunia yang menguasai teknologi informasi (IT), (iii) ketrampilan dan layanan secara intensif, mengandung layanan pendidikan terhadap lingkungan dan budaya, (iv) keterlibatan penduduk lokal sebagai subyek pembelajaran konservasi lingkungan dan budaya.

Kelembagaan ekowisata di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengembangan kawasan konservasi (*protected area*), khususnya wilayah taman nasional (TN), yang menyebar di hampir seluruh wilayah Nusantara (Lampiran 1). Ada beberapa alasan yang mendasari. **Pertama**, taman nasional memiliki kapasitas normatif dalam upaya-upaya konservasi, misalnya (i) memiliki potensi keanekaragaman hayati tinggi, flora dan fauna

yang khas, terancam dan mendekati kepunahan, dan (ii) daerah resapan air. **Kedua**, taman nasional memiliki kompetensi normatif untuk pemanfaatan jasa lingkungan, pengelolaan ekosistem, standar dan prosedur, keamanan dan kenyamanan, pendidikan dan ketrampilan, penelitian dan pengembangan, kerjasama internasional, partisipasi pengelolaan oleh operator/swasta, dan pengembangan promosi. **Ketiga**, taman nasional mendominasi luasan kawasan konservasi nasional, yakni 65 persen. Kawasan konservasi terdiri dari kawasan suaka alam (KSA), kawasan pelestarian alam (KPA) dan Taman Buru. KSA terdiri yakni cagar alam dan suaka margasatwa; KPA terdiri dari taman nasional, taman wisata alam serta taman hutan raya. Luasan kawasan konservasi telah mencapai 414 situs atau luasan 23.1 juta hektar, terdiri 18.4 juta hektar daratan dan 4.7 juta hektar pesisir dan laut. Kawasan konservasi darat masih di bawah 10 persen luas daratan, sebagai ambang yang disarankan oleh Convention on Biodiversity (USAID Indonesia, 2004).

Oleh sebab itu, kelembagaan TN dianggap sebagai komponen penting dalam pengembangan ekowisata, pengelolaan kawasan konservasi, serta upaya-upaya konservasi keanekaragaman hayati dalam skala nasional maupun internasional (Rothberg, 1999). Jasa ekowisata merupakan sektor riil terdepan yang mengemas jasa lingkungan dan budaya sehingga menghasilkan manfaat bagi banyak kepentingan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kelembagaan ekowisata di luar wilayah taman nasional juga dapat dikembangkan. Wilayah tujuan ekowisata tersebut biasanya memiliki karakteristik konservasi yang kuat dalam aspek sosial maupun lingkungan. Kearifan, pengalaman dan nilai-nilai budaya sedemikian menyatu dengan lingkungan untuk mendukung kehidupan ekonomi. Wilayah tujuan ekowisata itu dapat menjadi bagian dari ekosistem pesisir, lautan, atau daratan; di sekitar kawasan konservasi, desa atau wilayah yang memiliki

nilai-nilai khas yang harus diwariskan untuk generasi mendatang¹.

Produk dan jasa ekowisata meliputi enam jenis (Manurung, 2002): (i) pemandangan dan atraksi lingkungan dan budaya, misalnya titik pengamatan atau sajian budaya; (ii) manfaat lansekap, misalnya jalur pendakian atau trekking; (iii) akomodasi, misalnya pondok wisata, restoran; (iv) peralatan dan perlengkapan, misalnya sewa alat penyelam dan camping; (v) pendidikan dan ketrampilan, dan (vi) penghargaan, yakni prestasi di dalam upaya konservasi (lihat Tabel 1, contoh ekowisata di Jawa Timur).

Ditemukannya enam produk pada suatu wilayah tujuan ekowisata menunjukkan pengelolaan berjalan optimal, dan mencerminkan pembelajaran dari produk satu hingga kelima dan memperoleh penghargaan konservasi tingkat dunia (produk keenam). Pengembangan produk ekowisata di Indonesia sebagian besar masih sampai ke empat, yang berarti belum menguasai kegiatan-kegiatan interpretasi.

Relevansi Ekowisata dalam Pembangunan Daerah

Kerangka konseptual ekowisata seperti yang telah diuraikan sangat sejalan dengan pembangunan (otonomi) daerah, yakni dalam rangka menuju perekonomian daerah yang lebih sehat (*high performing economy*), tanpa kendala-kendala *asymmetric information*, ketidak efisienan atau distorsi, dan lemahnya mekanisme kelembagaan (Cullis and Jones, 1992; Williamson, 1995; Nugroho, 2000).

Relevansi ekowisata dalam pembangunan daerah dapat diuraikan sebagai berikut. **Pertama**, Indonesia belum cukup baik dalam mengelola sumber-sumberdaya publik² (*common and public resources*) antara lain sektor kehutanan, perikanan, kelautan dan pesisir. Pengalaman memperlihatkan

¹ Beberapa desa ekowisata telah berkembang, antara lain desa Candirejo, kec. Muntilan (Kab Magelang); desa Pelaga dan Belok Sidan, Kec Petang (Kab Badung); Desa Nusa Ceningan, Kec Nusa Penida (Kab. Klungkung); Desa Sibetan, Kec Bebandem (Kab Karangasem); Desa Tenganan, Kec Karangasem (Kab Karangasem) (Waria Kehati edisi Desember 2000)

Tabel 1. Produk dan Jasa Ekowisata pada wilayah Taman Nasional di Jawa Timur

No	Produk dan jasa ekowisata	Taman Nasional			
		Bromo Tengger Semeru	Meru Betiri	Baluran	Alas Purwo
1	Pemandangan dan atraksi lingkungan dan budaya	flora dan fauna; lautan pasir, matahari terbit, savana, ranu pane, ranu kumbolo, air terjun (trisulo dan pelangi); budaya Tengger, upacara kasodo dan karo,	flora dan fauna; Gunung Meru, Betiri, Teluk Hijau, Teluk Permisian, Teluk Damai; habitat dan pembiakan penyu di pantai Sukamade, Pantai Rajegwesi	flora dan fauna; gunung: gunung Baluran calderanya, gunung klosot, gunung priuk, gunung glenseran, gunung kakapa, gunung motor	flora dan fauna; pantai trianggulasi, plengkung, pasir gotri; goa istana, goa putri, goa padepokan, budaya blambangan, pura hindu
2	Manfaat lansekap	pendakian gunung Semeru, Bromo, Widodaren, Babok, offroad, trekking lautan pasir, trekking savana, para layang	Menjelajahi hutan di Teluk Hijau, trekking Bande Alit-Sukamade (3 hari), panjat tebing, wisata bahari, kampung nelayan tradisional	Wisata bahari, memancing, kano menyusuri pantai, menyelam/snorkelling di Bama, Balanan, Bilik; mendaki gunung Baluran, trekking savana	Selancar di Plengkung, jelajah hutan, mengamati banteng di Sedengan, trekking Trianggulasi, Plengkung
3	Akomodasi dan fasilitas layanan pendukung	hotel, restoran, pondok wisata di Ngadisari dan Ranu pane, camping ground	Wisma peneliti, pondok wisata, menara pandang, camping ground	Wisma peneliti, kantin, menara pandang di Bekol dan Samiang untuk pengamatan satwa, camping ground	Wisma peneliti, pondok wisata, selancar, menara pandang di Sedengan, shelter, camping ground
4	Peralatan dan perlengkapan	Pemandu wisata, Sewa kuda, motor ojek, offroad	Pemandu wisata, motor jagawana	Pemandu wisata, motor ojek/jagawana	Pemandu wisata, motor ojek, sewa boat, sewa alat selancar, motor jagawana,
5	Pendidikan dan ketrampilan	Penelitian kearifan lokal,	Penelitian penyu, ekspedisi harimau jawa	Penelitian kerbau liar	Penyelamatan banteng, penyu dan sawo kecil
6	Penghargaan, prestasi konservasi atau layanan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber: dikompilasi dari http://www.dephut.go.id/INFORMASI/TN%20INDO-ENGLISH/tn_index.htm dan Nugroho dan Negara (2008)

bahwa produktivitas sumberdaya tersebut cenderung merosot akibat pengelolaan yang salah (ada perilaku *free-rider*). Konsepsi ekowisata berupaya membangun kelembagaan, mengutamakan pendefinisian *property right* dan *rule of the game*, dan mempertimbangkan aspirasi khususnya penduduk lokal.

Kedua, prinsip keadilan ekonomi. Otonomi daerah diharapkan dapat memenuhi prinsip bahwa yang menghasilkan adalah yang menikmati, dan yang menikmati haruslah yang menghasilkan. Konsepsi ekowisata menunjukkan adanya bukti aktivitas ekonomi riil di wilayah taman nasional yang

² Ciri umumnya adalah *non-rivalry in consumption*, artinya dalam batas-batas tertentu kenikmatan seseorang terhadap sumberdaya tertentu tidak berkurang akibat adanya orang lain yang mengkonsumsi sumberdaya yang sama (lihat Cullis and Jones, 1992)

diperankan oleh penduduk lokal. Hal ini berimplikasi *benefit* dan *cost* mengalir proporsional sehingga dapat dicegah munculnya *externality* dalam aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Ketiga, meningkatnya *domestic purchasing power*. Kedatangan pengunjung dari luar wilayah akan memberikan multiplier ekonomi bagi wilayah lokal, berupa pendapatan penduduk lokal, permintaan komoditi, peningkatan aktivitas ekonomi lokal, maupun pajak/retribusi. Keadaan ini akan memperkuat pembangunan ekonomi daerah. Dalam skala nasional, keadaan ini bukan saja berimplikasi kepada produktifitas (*efficiency*) dan kesejahteraan (*equity*), tetapi juga menciptakan kemandirian nasional dalam rangka menyongsong liberalisasi perdagangan.

Keempat, penguatan budaya. Budaya merupakan aset utama untuk dikembangkan sebagai kekuatan ekonomi daerah, disamping untuk memperkuat ketahanan budaya itu sendiri (Hatta, 2004) dan ketahanan nasional (Pokja Tannas, 2010). *Budaya, lingkungan dan peninggalan sejarah* adalah nyawa atau "roh" dari kegiatan pariwisata Indonesia (Ardika, 2003). Kekuatan budaya Indonesia yang diangkat melalui ekowisata diharapkan menghasilkan pengalaman unik, pengetahuan, dan pendidikan yang lebih signifikan dibanding fasilitas, sarana atau pemandangan alam yang mungkin tidak jauh berbeda dengan tempat tujuan lain.

Kelima, peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM). Otonomi daerah akan berhasil bila diiringi peningkatan kualitas SDM aparat pemda, pelaku ekonomi dan penduduk lokal. Ekowisata membutuhkan kesiapan dan kualitas SDM di segala sektor dengan penguasaan IT. Lebih dari itu, SDM ekowisata berkarakter global, modern dan educated agar dapat menjalankan sistem produksi ekowisata. Untuk itu, aparat pemda perlu bekal kompetensi dan budaya pariwisata agar dapat memformulasikan program-program relevan di setiap wilayah.

Pengembangan Ekowisata dan Peran Pemerintah Daerah

Kebijakan pembangunan yang terkait dengan pengelolaan jasa ekowisata perlu terus dikembang-

kan. Sesungguhnya, potensi dari 50 taman nasional belum terealisasi sepenuhnya, dimana seluruh penduduk sekitarnya pun belum menikmati kesejahteraan yang selayaknya. Pada saat yang sama, faktor lingkungan maupun sosial juga relatif peka terhadap ancaman ekonomi pasar dalam wujud eksploitasi sumberdaya keanekaragaman hayati.

Posisi kritikal kebijakan pengembangan ekowisata sesungguhnya terletak pada tingkat implementasi di **wilayah lokal atau pemda**. Di tingkat lokal tersebut, bertemu kepentingan penyediaan jasa ekowisata dan permintaan pengunjung. Bisnis jasa ekowisata mungkin saja menghadapi kendala seperti dihadapi bisnis umumnya. Namun, jasa ekowisata perlu lebih serius ditangani agar supaya menghasilkan nilai tambah yang nyata dan positif bagi kegiatan konservasi lingkungan dan budaya setempat. Peran pemda dalam pengembangan ekowisata disajikan berikut:

a. Pengembangan kapasitas lokal

Masyarakat lokal perlu diberdayakan dengan menyusun kebutuhannya dengan pendampingan LSM, kepercayaan TN dan dukungan pemerintah setempat. Kebutuhan tersebut kemudian diakomodasikan di dalam rencana program konservasi hutan dan pengembangan jasa ekowisata yang terencana dan berkelanjutan.

Pengalaman Indecon, LSM ekowisata³, memerlukan waktu dua tahun untuk pendampingan hingga penduduk lokal Tangkahan, di wilayah TN Gunung Leuser dapat secara mandiri dan berinteraksi dengan pengunjung dan *tour operator*. Bahkan penduduk lokal mampu menjadi garis terdepan upaya-upaya konservasi, padahal sebelumnya mereka tergabung dalam penebang liar. Saat ini kebutuhan kesejahteraan penduduk Tangkahan bersumber dari produk dan jasa ekowisata, perkebunan dan jasa penunjang lain. Gambaran buruk kendala konservasi, antara lain kurangnya kemauan politik; korupsi dan suap; *moral hazard* dari aparat; terbatasnya kapasitas untuk konservasi sumber daya dan penegakan hukum; dan konflik kepentingan sektor swasta dan masyarakat umum, sudah mampu diatasi.

b. Infrastruktur

Kecadaan infrastruktur menuju wilayah taman nasional umumnya belum memadai. Sebagai contoh, menuju taman nasional di Jawa Timur, akses dari Surabaya, Bali atau kota terdekat relatif tersedia melalui transportasi darat. Namun demikian, akses mendekati atau di dalam taman nasional umumnya belum memuaskan. Kendaraan umum untuk perjalanan malam hari umumnya tidak tersedia sehingga pengunjung harus merencanakan jadwal perjalanannya lebih rapi. Di TN Meru Betiri, kendaraan umum dari kecamatan terdekat terjadwal hanya sekali sehari, itupun menggunakan truk. Kendaraan umum di TN Bromo Tengger Semeru menyatu dengan angkutan pedagang hasil bumi (Nugroho, 2006; Nugroho dan Negara, 2008). Namun secara umum, angkutan ojek motor roda dua lebih leluasa mengantarkan pengunjung ke mana saja sekalipun aspek keamanan dan kenyamanan kurang terjamin.

Kendala akses menuju taman nasional memang problem yang tidak sederhana. Hal itu juga tidak lepas dari rendahnya jumlah pengunjung. Semakin banyak pengunjung, secara alamiah akan mengundang investasi infrastruktur. Tantangan tersebut menjadi peluang dikembangkannya sarana transportasi oleh penduduk setempat. Sarana itu bisa berupa motor trail, sepeda gunung, kuda, perahu motor atau lainnya, yang disewakan kepada pengunjung namun memiliki kenyamanan dan tidak mengganggu upaya konservasi lingkungan.

c. Pemerintahan Yang Baik dan Berwibawa (Good Governance)

Good governance akan menjalankan tatanan Sistem Manajemen Nasional (Sismennas) (Pokja Sismennas, 2010) khususnya bidang pariwisata. *Good governance* senantiasa dikaitkan dengan paradigma *good corporate governance* dalam dunia swasta. Pengenalan terhadap manajemen bisnis swasta (*enterprising the government*) sangat perlu agar organisasi pemerintahan menjadi efektif dan

berorientasi kepada layanan. Manajemen "swasta" ini sejalan dengan pendekatan manajemen publik (*new public management* atau *public service orientation*) dari Moore (1996) atau Mustopadidjaja (2006), yang memiliki karakteristik: (a) profesional dan akuntabel; (b) ukuran kinerja berciri kuantitatif; (c) terjadi mekanisme pengendalian pada input, proses dan output; (d) kompetisi; dan (e) disiplin.

Kebijakan pariwisata di Indonesia mengacu kepada hubungan antar industri maupun terlaksananya fungsi-fungsi organisasi. Hubungan antar industri ditunjukkan dengan keterkaitan sektor jasa pariwisata dengan sektor lain, misalnya kehutanan, perkotaan, pendidikan, dan infrastruktur. Sementara hubungan fungsional organisasi mengacu kepada fungsi-fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian (Tabel 2).

Pengelolaan industri jasa pariwisata secara langsung berada dalam wewenang Kementerian Kehutanan (Dephut) dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar). Keduanya merupakan unsur pelaksana yang mengoperasionalkan ke dalam rambu-rambu pengelolaan secara berkelanjutan. Pemda (Depdagri) berperan di dalam upaya mengkoordinasikan dan mengendalikan peran dan aliran manfaat kepada masyarakat, penduduk lokal dan swasta; melalui kebijakan penataan ruang, prosedur investasi dan perihal teknis lainnya. Dari sini pertumbuhan ekonomi dihasilkan, pengunjung memperoleh pengalaman dan ketrampilan, masyarakat dan penduduk lokal memperoleh kesempatan kerja dan penghasilan, swasta memperoleh nilai tambah dan pemda memperoleh pajak/retribusi untuk dikembalikan ke upaya-upaya konservasi.

Atas dasar hubungan kelembagaan tersebut, fungsi koordinasi menjadi penting. Landasan koordinasi adalah Inpres 16 tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata, yang menginstruksikan Menteri dan Badan-badan Pemerintah terkait serta semua Gubernur dan Bupati/Walikota untuk men-

¹ Sumber: Kompas 6 April 2003; <http://portal.sabhanawana.com/> (portal penjelajah alam Indonesia); Pikiran Rakyat, 8 Mei 2006

Tabel 2. Klasifikasi Hubungan dan Kebijakan Pariwisata

Hubungan industri	Hubungan fungsional organisasi		
	Perencanaan (<i>plan</i>)	Pelaksanaan (<i>do and action</i>)	Pengendalian/ monitoring (<i>check</i>)
Hulu	Bappenas, Menko Perekonomian, Dephan	Depkimpraswil, Depkeu, Menristek	-
Utama	Depdagri (BPN), Depkimpraswil	Dephut, Depbudpar	KLH, Depdagri
Hilir	-	Deptan, DKP, DESM, Depdagri, Deperindag	TNI, Kepolisian, DepkehHAM, Pengadilan

Istilah Departemen setara dengan Kementerian

dukung dan berkoordinasi erat bagi percepatan pembangunan Pariwisata Indonesia (Wacik, 2007).

d. Integrasi promosi

Dalam dunia pariwisata Bali lebih dikenal dibanding Indonesia. Mengapa? Karena informasi mengenai Bali dalam aspek budaya dan lingkungan lebih lengkap dan positif dibanding Indonesia secara keseluruhan. Informasi tentang Bali juga ditemui di banyak tempat di seluruh dunia. Hal ini menunjukkan bahwa Bali memiliki *positioning* yang lebih baik dibanding Indonesia. Nama Bali terintegrasi dengan nama-nama kota dan tempat wisata di dunia.

Pengembangan jasa ekowisata di suatu wilayah perlu menemukan sekaligus mengikuti *positioning* seperti halnya Bali. Strategi pemasaran ini memerlukan dukungan pengembangan produk, segmentasi pasar, dan teknologi pemasaran. Harus diakui wilayah tujuan ekowisata di Indonesia belum terpromosikan dengan baik. Jasa pariwisata dan penunjangnya di tingkat daerah adalah ujung tombak promosi ekowisata setempat.

Sudah sewajarnya hotel dan restoran, biro perjalanan, *airport*, kantor *airline*, pelabuhan laut, terminal bis, atau dinas-dinas pariwisata di setiap propinsi menyajikan informasi perihal taman nasional di wilayahnya. Setiap pemda selayaknya meneladani

perilaku dan kebijakan pariwisata di Propinsi Bali. Promosi tingkat lokal untuk kepentingan domestik dapat menjadi proses pembelajaran bagi penyusunan kebijakan pariwisata. Hal ini juga sangat relevan karena jumlah wisatawan domestik juga sangat signifikan untuk pengembangan pariwisata nasional. Masih perlu dikembangkan isu yang terkait dengan konservasi atau produk dan jasa ekowisata unggulan setempat. Isyu ini berguna untuk menarik perhatian dunia sehingga dapat diidentifikasi pasarnya. Dari sini kemudian dapat ditentukan teknik pemasarannya.

e. Pengembangan produk

Arah pengembangan produk dan jasa ekowisata ditujukan kepada kegiatan interpretasi, yakni upaya pemahaman terhadap suatu obyek, sehingga seseorang mampu bereaksi dan menimbulkan suatu relasi positif antara manusia dengan obyek/alam tersebut. Untuk terciptanya suatu hubungan yang positif tersebut dibutuhkan *interpreter*, yang bertugas sebagai penjelas dan penterjemah obyek yang dikunjungi (Sunaryo, 1998). Seperti disajikan pada Tabel 1, kegiatan interpretasi lahir pada produk ke lima, yakni pendidikan dan ketrampilan (Nugroho, 2007)

Tanpa interpretasi, aktivitas ekowisata beroperasi tidak optimal, atau menghasilkan keluaran seperti kegiatan wisata umumnya. Dalam keadaan seperti

itu, aktivitas jasa ekowisata masih diwarnai kegiatan-kegiatan yang mengancam kelestarian lingkungan, antara lain menjual kayu bakar (2.1 persen) dan hasil hutan lain (2.8 persen), serta perburuan satwa (3.5 persen) (Goodwin, 2002). Ancaman semakin besar pada wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan tanpa kemampuan berwirausaha.

Kegiatan-kegiatan interpretasi hendaknya menjadi fokus pengembangan produk ekowisata. Kegiatan interpretasi menuntut penguasaan filosofis hingga praktis perihal aset lingkungan, budaya dan karakteristik lokal lainnya. Dalam interpretasi, terjadi transfer pengetahuan dan ketrampilan yang intensif yang menghasilkan pengalaman dan kepuasan bagi pengunjung serta nilai tambah bagi penduduk lokal. Di Bali, pengunjung diberi kesempatan mengikuti upacara tradisional⁴, dengan membayar harga relatif mahal. Di Tangkahan, pengunjung dapat memandikan gajah dengan membayar 15 ribu rupiah, atau trekking dengan mengendarai gajah dengan harga 160 ribu rupiah. Pendeknya, semua atraksi dapat dikemas secara interaktif yang melibatkan psikomotorik pengunjung.

Kegiatan interpretasi diperkuat oleh kemampuan kewirausahaan penduduk lokal. Hasil studi Nugroho, Negara dan Nugroho (2009) menunjukkan bahwa kewirausahaan individu dalam jasa ekowisata sangat dipengaruhi oleh apa yang disebut sebagai kewirausahaan sosial. Menurut Martin dan Osberg (2007), mekanisme kewirausahaan individu adalah mengantisipasi dan mengorganisasikan pasar agar berfungsi menghasilkan produk dan jasa sekaligus profit bagi *entrepreneur*. Sementara mekanisme kewirausahaan sosial adalah memberdayakan masyarakat yang kurang beruntung menjadi lebih berkesempatan untuk mencapai kesejahteraan. Menurut Juma and Timmer (2003), pembelajaran sosial (*social learning*) menjadi bagian penting dimana individu-individu memahami kewirausahaan. Dengan demikian, fenomena ini mampu membuktikan

bahwa pengembangan kewirausahaan sosial adalah syarat perlu bagi penda untuk mengembangkan kewirausahaan individu jasa ekowisata.

f. Pembukaan *enclave* wisata

Fenomena munculnya *enclave* wisata umum ditemukan dan menjadi kendala peningkatan partisipasi dan kesejahteraan penduduk lokal. Wisatawan yang tinggal dalam resor atau hotel, sedang perjalanan dengan *boat* atau kendaraan wisata, secara fisik sulit diakses oleh penduduk lokal (Goodwin, 2002; Shaw and Shaw, 1999). Fenomena *enclave* mirip teori dualisme dimana sektor modern dan tradisional saling berdampingan namun tidak saling berinteraksi positif. Di Bali, Shaw and Shaw (1999) menemukan bahwa penduduk lokal makin termarginalisasi secara ekonomi maupun geografi dan melahirkan sektor-sektor wisata informal. Sektor informal tersebut kemudian hanya makin memperluas kesenjangan sosial dan budaya di antara pengusaha lokal (*host*) dan investor (*guest*), sehingga pemulihan ekonomi pasca krisis ekonomi 1998 berjalan melambat.

Di TN Komodo, dampak dari *enclave* ekonomi menghasilkan kebocoran manfaat ekonomi sebesar 50 persen. Kebocoran berasal dari penggunaan bahan-bahan dari luar wilayah di dalam kegiatan ekonomi lokal, antara lain transportasi dan konsumsi (snack, minuman botol, rokok, kartu pos) yang dioperasikan dan diproduksi oleh pelaku ekonomi dari luar wilayah. Kebocoran dari kegiatan restoran, sewa boat, warung/toko, dan transportasi berturut-turut sebesar 20, 58, 60 dan 93 persen (Goodwin, 2002).

Upaya pencegahan atau untuk membuka fenomena *enclave* memerlukan perencanaan strategis dalam pengembangan ekowisata. Hal tersebut meliputi: (i) membuka akses penduduk lokal dalam pasar ekowisata, (ii) mengenali bentuk dan struktur geografi *enclave* versus penduduk lokal, (iii) mengoptimalkan keterkaitan ekonomi lokal dalam

⁴ Seni pertunjukan Bali dapat dikategorikan menjadi tiga: (i) *wali* (seri pertunjukan sakral) yang hanya dilakukan saat ritual perwujudan; (ii) *bebali* yakni pertunjukan untuk upacara tetapi juga untuk pengunjung; dan *balih-balihan* yang sifatnya untuk hiburan belaka di tempat-tempat umum (Tisna, 2005)

ekowisata, (iv) membangun sinergi dan kebersamaan aktifitas ekowisata melalui pengembangan kesempatan kerja dan usaha kecil, (v) mengevaluasi ekonomi lokal dalam proyek-proyek pengembangan ekowisata, (vi) memelihara konservasi aset lingkungan dan budaya, (vii) mengendalikan dampak sosial dari aktivitas ekowisata dan (viii) mengendalikan pertumbuhan ekonomi ekowisata.

g. Simnas Pariwisata

Untuk memperkuat manajemen penyelenggaraan pariwisata di tingkat nasional dan daerah, perlu dikembangkan Sistem Informasi Manajemen Nasional (Simnas) dan Dacrah (Simda) Pariwisata. Pendekatan pengelolaan ini diperlukan untuk keberlangsungan siklus tatanan Sistem Manajemen Nasional (Pokja Sismennas, 2010). Simnas Pariwisata berperan penting untuk mendukung tatakelola dan layanan masyarakat (*e-government*) maupun investasi pengembangan pariwisata (*e-commerce*).

Simnas Pariwisata juga digunakan untuk mengintegrasikan seluruh stakeholder pariwisata. Jaringan stakeholder sangatlah luas, meliputi pemerintah (pusat dan daerah), swasta (biro travel, airline, hotel, tour operator), wisatawan (manca negara atau nusantara), penduduk lokal, kelompok masyarakat nirlaba (LSM, peneliti, perguruan tinggi atau yang sejenis), dan pihak lain penunjang pariwisata. Masing-masing stakeholder mempunyai fungsi yang memberi dan menerima aliran manfaat kepada satu sama lain. *Networking* di antara stakeholder telah demikian kompleks dan canggih didukung oleh sistem bisnis pariwisata yang modern dan terintegrasi. Seorang calon wisatawan dapat menemukan informasi sekaligus memverifikasinya tentang suatu tujuan wisata dan jadwal kunjungan. Berikutnya ia dapat mengakses dan mengampil keputusan memilih moda transportasi dan jenis akomodasi.

Fenomena IT di dunia pariwisata telah berkembang. Hampir dipastikan SDM pariwisata menjadi terdepan dalam penggunaan IT dibanding sektor lain. Strijbos (1998) menyatakan pengembangan teknologi harus dipahami sebagai

proses konstruksi sosial. Artinya seluruh SDM dibangun kesadarannya akan kepentingan dan manfaat IT, sehingga mereka bersedia menerima, menjalankan, mematuhi dan mengembangkan sistem IT. Namun, IT tentu bukan segala-galanya, IT harus ditempatkan sebagai pendukung berjalannya Sismennas Pariwisata. Pelaku pariwisata perlu terus menggali, mengolah dan mengasah nilai-nilai etika dan norma agar dapat membangun budaya organisasi. Prinsip etika dan norma diperlukan untuk mengawal transformasi konstruksi sosial berbasis IT untuk memperkuat Sismennas Pariwisata dan menghasilkan kesejahteraan.

Penutup

Pengembangan ekowisata memberikan dukungan bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Relevansi ekowisata tersebut antara lain (i) pengelolaan sumber-sumberdaya publik lebih baik, (ii) *benefit* dan *cost* mengalir proporsional di daerah, (iii) meningkatnya *domestic purchasing power*, (iv) peningkatan kesejahteraan penduduk lokal, (v) penguatan budaya daerah, dan (vi) peningkatan kualitas SDM di daerah.

Peran pemda sangat signifikan dalam pengembangan ekowisata. Peran tersebut difokuskan kepada (i) pengembangan kapasitas lokal, (ii) infrastruktur, (iii) *good governance*, (iv) integrasi promosi, (v) pengembangan produk, (vi) pencegahan enclave, dan (vii) simnas pariwisata.

Daftar Pustaka

- Ardika, I. G. 2003. Development of Ecotourism in Indonesia. www.world-tourism.org/sustainable/TYE/Regional_Activities/Maldives/ardika.pdf (17 September 2003)
- Ardiwidjaja, R. 2006. Pariwisata Budaya, Mengapa Tidak Sekarang? www.budpar.go.id/filedata/747_88-pariwisatabudaya.pdf
- Cullis, J. and P. Jones. 1992. Public Finance And Public Choice: Analytical perspectives. McGraw-Hill International Editions-Economics series, Singapore. 486p.
- Goodwin, H. 2002. Local community involvement in tourism around national parks: opportunities and constraints. *Current Issues in Tourism* 5(3&4): 338-360
- Hatta, Meutia Farida. 2004. Membangun Ketahanan Budaya Bangsa Melalui Kesenian. *Majalah Perencanaan Pembangunan*. Bappenas Jakarta. IX(6): 75-77
- Juma, C. and V. Timmer. 2003. "Social Learning and

- Entrepreneurship: A Framework for Analyzing the Equator Initiative and the 2002 Equator Prize Finalists." Working paper of 5 December 2003
- Manurung. 2002. Ecotourism in Indonesia. In: Hundloe, T (ed.). *Linking Green Productivity to Ecotourism : Experiences in the Asia-Pacific Region*. Asian Productivity Organization (APO), Tokyo, Japan. 98-103
- Martin, R. L. and S. Osberg. 2007. Social entrepreneurship: the case for definition. *Stanford Social Innovation Review*. Spring 2007. 39p
- Moore, C. 1996. Human resources in the public sector. In: Towers, B (ed.). *The Handbook of Human Resources Management*. Blackwell Business, Massachusetts. 353-372.
- Mustopadidjaja, A. R. 2008. *Gran Strategi Reformasi Birokrasi: Kebijakan, Kinerja, dan Langkah Ke Depan*. Jurnal Negarawan. 7. Februari 2008.
- Nugroho, I. 2006. Mengangkat Ekowisata Ngadas di Kawasan Bromo Tengger Semeru. *TEROPONG*, Balitbang Provinsi Jatim. 28 (Juni-Agustus 2006):21-23.
- Nugroho, I. dan P. D Negara. 2008. Produk dan Jasa Ekowisata di Jawa Timur. *TEROPONG*, Balitbang Provinsi Jatim. 38 (Maret-April 2008):26-29.
- Nugroho, I. P. D. Negara dan Y. A. Nugroho. 2009. Karakteristik Kewirausahaan Penduduk Lokal Pada Jasa Ekowisata di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. *Social Economic of Agriculture and Agribusiness (SOCA) Journal*, Fakultas Pertanian, Universitas Udayana Denpasar. 9(3): 342-346.
- Nugroho, I. 2000. Pengembangan Perekonomian Perdesaan Menyongsong Otonomi Daerah. *ANALISIS CSIS Jakarta*, Tahun XXIX/2000, No 1, halaman 102-114
- Nugroho, I. 2007. Ekowisata: Sektor Riil Pendukung Pembangunan Berkelanjutan. *Majalah Perencanaan Pembangunan-BAPPENAS Jakarta*. Edisi 2 tahun ke XII (Januari-Maret); 44-57.
- Pokja Sismennas. 2010. *Sistem Manajemen Nasional*. Pokja Sismennas, Lemhannas RI, Jakarta.
- Pokja Tannas. 2010. *Materi Pokok Ketahanan Nasional: Geostrategi Indonesia*. Pokja Tannas, Lemhannas RI, Jakarta.
- Pokja Wasantara. 2010. *Konsepsi Wawasan Nusantara*. Pokja Wasantara, Lemhannas, Jakarta
- Rothberg, D. 1999. *Enhanced and Alternative Financing Mechanisms Strengthening National Park Management in Indonesia*. NRMP USAID, Jakarta
- Shaw, B.J. and Shaw, G. 1999. Sun, sand and sales: enclave tourism and local entrepreneurship in Indonesia. *Current Issues in Tourism* 2 (1), 68-81.
- Strijbos, S. 1998. Ethics and the systemic character of modern technology. *Phil & Tech*. 3(4 Summer): 19-34.
- Sunaryo. 1998. *Penyelenggaraan Beberapa Kegiatan Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango*. Lokakarya Kepala Balai dan Kepala Unit Taman Nasional se-Indonesia, Lido, Bogor 21-25 Oktober 1998.
- TIES (The International Ecotourism Society). 2006. *Fact Sheet: Global Ecotourism*. Updated edition, September 2006. www.ecotourism.org.
- Tisna, I. G. R. P. 2005. *Sekilas Tentang Dinamika Seni Pertunjukan Tradisional Bali Dalam Konteks Pariwisata Budaya*. Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia. www.msipi.org
- USAID Indonesia. 2004. *Report on Biodiversity and Tropical Forests in Indonesia Submitted in accordance with Foreign Assistance Act Sections 118/119*
- Wacik, J. 2007. Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata. *Jurnal Negarawan*. 4, Mei 2007.
- Williamson, O. E. 1995. The institutions and governance of economic development and reform. *Proceeding of the World Bank Annual Conference on Development Economies 1994*. IBRD-World Bank, Washington, DC.
- Wood, M. E. 2002. *Ecotourism: Principles, Practices and Policies for Sustainability*. UNEP.

Lapiran: Taman Nasional Indonesia

No	Taman Nasional	Luas (ha)	Lokasi, propinsi	Ekosistem	Keputusan Menhut
1.	Bukit Barisan Selatan	365.000	Bengkulu, Lampung	Hutan Tropika (s)	Mentan No. 736/Mentan/X/1982
2.	Gunung Palung	90.000	Kalbar	Hutan Tropika, Rawa (s)	448/Kpts-VI/1990
3.	Rawa Aopa Watumohai	105.194	Sultra	Rawa, Hutan Tropika (s)	756/Kpts-II/1990
4.	Bunaken	89.065	Sulut	Laut, pesisir (s)	730/Kpts-II/1991
5.	Bukit Baka-Bukit Raya	181.090	Kalbar, Kalteng	Hutan Tropika (s)	281/Kpts-II/1992
6.	Ujung Kulon	122.956	Banten	Hutan tropika, Pesisir, laut (s)	284/Kpts-II/1992
7.	Berbak	162.700	Jambi	Rawa gambut, air tawar (s)	285/Kpts-III/1992
8.	Bogani Nani Wartabone	287.115	Sulut, Gorontalo	Hutan Tropika (s)	731/Kpts-II/1992
9.	Alas Purwo	43.420	Jatim	Hutan Tropika (t)	190/Kpts-II/1993
10.	Siberut	190.500	Sumbar	Hutan Tropika (s)	407/Kpts-II/1993
11.	Kutai	198.629	Kaltim	Rawa, Hutan Tropika (t)	325/Kpts-II/1995
12.	Batung Kerihun	800.000	Kalbar	Hutan Tropika (s)	467/Kpts-II/1995
13.	Bali Barat	19.002	Bali	Hutan Tropika, Pesisir, laut (t)	493/Kpts-II/1995
14.	Kayan Mentarang	1.360.500	Kaltim	Hutan Tropika (s)	631/Kpts-II/1996
15.	Tanjung Puting	415.040	Kalteng	Rawa, Hutan Tropika (t)	687/Kpts-III/1996
16.	Lorentz	2.450.000	Papua	Rawa, Hutan Tropika (s)	154/Kpts-II/1997
17.	Gunung Leuser	1.094.692	N Aceh Drslm	Hutan Tropika (t)	278/Kpts-VI/1997
18.	Meru Betiri	58.000	Jatim	Rawa, Hutan Tropika (t)	277/Kpts-VI/1997
19.	Bromo Tengger Semeru	50.276	Jatim	Hutan Tropika (s)	278/Kpts-VI/1997
20.	Baluran	25.000	Jatim	Savana, pantai, Hutan Tropika (t)	279/Kpts-VI/1997
21.	Gunung Rinjani	40.000	NTB	Hutan Tropika (s)	280/Kpts-VI/1997
22.	Manusela	189.000	Maluku	Hutan Tropika (s)	281/Kpts-IV/1997
23.	Wasur	413.810	Papua	Savana, rawa (s)	282/Kpts-VI/1997
24.	Kelimutu	5.000	NTT	Hutan Tropika (s)	675/Kpts-II/1997
25.	Laiwengi-Wanggamet	47.014	NTT	Hutan Tropika (s)	576/Kpts-II/1998
26.	Manupeu-Tanah Daru	87.984	NTT	Hutan Tropika (s)	576/Kpts-II/1998
27.	Danau Sentarum	132.000	Kalbar	Rawa, danau (s)	34/Kpts-II/1999
28.	Lore Lindu	217.991	Sulteng	Hutan Tropika (s)	646/Kpts-II/1999
29.	Way Kambas	125.621	Lampung	Rawa, Hutan Tropika (s)	670/Kpts-II/1999
30.	Kerinci Seblat	1.375.349	Sumbar, Jambi, Bengkulu, Sumsel	Hutan Tropika (s)	901/Kpts-II/1999
31.	Komodo	173.300	NTT	Savana, pesisir (s)	172/Kpts-II/2000
32.	Bukit Dua Belas	60.500	Jambi	Hutan Tropika (s)	258/Kpts-II/2000
33.	Kep Karimunjawa	110.117	Jateng	Laut, Pesisir (t)	74/Kpts-II/2001
34.	Taka Bonerate	630.765	Sulsel	Laut, Pesisir (s)	92/Kpts-II/2001

No	Taman Nasional	Luas (ha)	Lokasi, provinsi	Ekosistem	Keputusan Menhut
35.	Kep Wakatobi	1.390.000	Sultra	Laut, Pesisir (s)	765/Kpts-II/2002
35.	Kep Seribu	108.000	Jakarta	Laut, Pesisir (t)	6310/Kpts-II/2002
37.	Bukit Tiga Puluh	127.698	Riau, Jambi	Hutan Tropika (s)	6407/Kpts-II/2002
38.	Tel Cenderawasih	1.453.500	Papua	Hutan propika, Laut, Pesisir (s)	8008/Kpts-II/2002
39.	Sembilang	205.078	Sumsel	Rawa gambut, air tawar (s)	95/Kpts-II/2003
40.	Gunung Gede Pangrango	15.000	Jabar	Hutan Tropika (t)	174/Kpts-II/2003
41.	Gunung Halimun	40.000	Jabar, Banten	Hutan Tropika (t)	175/Kpts-II/2003
42.	Aketajawa-Lolobata	167.300	Halmahera, Maluku Utara	Hutan Tropika	397/Menhut-II/2004
43.	Bantimurung - Bulusaraung	43.750	Sulsel	Hutan Tropika	398/ Menhut-II/2004
44.	Batang Gadis	108.000	Sumut	Hutan Tropika	126/ Menhut-II/2004
45.	Gunung Ciremai	15.500	Jabar	Hutan Tropika	424/ Menhut-II/2004
46.	Gunung Merbabu	5.725	Jateng	Hutan Tropika	135/ Menhut-II/2004
47.	Gunung Merapi	6.410	Jateng	Hutan Tropika	134/ Menhut-II/2004
48.	Togean	362.605	Sulteng	Hutan Tropika, Laut, Pesisir	418/ Menhut-II/2004
49.	Sebangau	568.700	Kalteng	Rawa Gambut	423/Menhut-II/2004
50.	Tesso Nilo	38.576	Riau	Hutan Tropika	255/Menhut-II/2004

(s) ancaman sedang

(t) ancaman tinggi

Sumber: USAID Indonesia (2004)